

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Struktur Perekonomian

Struktur adalah susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan (Hasibuan, 1993) dalam bukunya Arsyad dan Kusuma, 2014. Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembangian sektor primer, skunder dan tersier. Ada kecenderungan (dapat dilihat sebagai hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor pendukung lain mendukung proses, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku dan teknologi tersedia.

2.1.2 Teori Basis Ekonomi

Toeri basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kegiatan itu menciptakan nilai tambah, mendorong sektor lain untuk turut berkembang tapi tidak investor lokal lain yang dirugikan. Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sektor *service* atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian

yang keliru tentang arti *service* disebut saja sektor nonbasis. Sektor nonbasis (*service*) adalah untuk kebutuhan konsumsi lokal. Oleh sebab itu, kenaikannya sejalan kenaikan pendapatan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan diatas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis (Tarigan, 2015).

Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh atau tidak tumbuhnya suatu wilayah dan cepat atau tidaknya wilayah itu tumbuh di tentukan oleh bagaimana kinerja wilayah tersebut sebagai eksportir ke daerah lain dan atau keluar negeri (Banvidal-Val, 1991, dalam Prasetyo Soepono, 2001). Lincoln Arsyad (1999) juga menyatakan bahwa teori basis ekonomi ini merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah, adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang mnggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baik untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan lapangan kerja (*job creation*). Sehingga dalam pembangunan perlu perencanaan yang tepat, oleh karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari segi sektor potensi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, penduduk, sosial budaya dan sebagainya.

Potensi sumber daya yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidak merata dan seragam, oleh karena itu pertumbuhannya pun berbeda.

Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila region ini kuat maka akan terjadi perambatan pertumbuhan bagi region-region lemah. Pertumbuhan ini berdampak positif (*trickle down effect*) yaitu adanya pertumbuhan di region yang kuat akan menyerap potensi di region yang lemah atau mungkin region yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang kuat (Sitohang,1991).

Sektor-sektor ekonomi dapat juga di bagi berdasarkan keunggulan yaitu sektor basis dan non basis. Menurut Glasson (1977) kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan mengeksor barang-barang dan jasa-jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang-barang yang di butuhkan oh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang, jadi ruang lingkup dan daerah pasar terutama bersifat lokal.

Secara implit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa, maka akan menimbulkan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa yang akan menurunkan volume kegiatan. Kegiatan basis mempunyai

peranan penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Bertambah banyaknya sektor basis kedalam suatu daerah juga akan mengakibatkan kenaikan konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Kenaikan pendapatan di daerah tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis.

Multiplier basis ekonomi biasanya dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan. Akan tetapi indikator tenaga kerja (*employment*) mengandung kelemahan yaitu tenaga kerja lebih bersifat diskontinyu, artinya tidak peka sebagai indikator perubahan-perubahan kegiatan basis dalam jangka pendek. Disamping itu tenaga kerja tidak mampu mencakup pengaruh-pengaruh diferensial yang timbul oleh sektor basis terhadap pendapatan (Richardson, 1977). Oleh sebab keterbatasan data tenaga kerja, maka indikator yang lebih baik digunakan adalah data pendapatan regional maupun data produk domestik regional bruto (PDRB) yang lebih peka terhadap perubahan-perubahan kegiatan basis (Richardson, 1977).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*Location Quotient*). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik LQ berbagai perubah atau factor dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

2.1.3 Teori Perubuaahan Struktur

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang secara radikal. Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Perubahan struktural dapat bermula dengan peralihan penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder dan kemudian ke sektor tersier (Jhingan, 43).

Teori perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi oleh sektor industri dan jasa (Todaro, 1999).

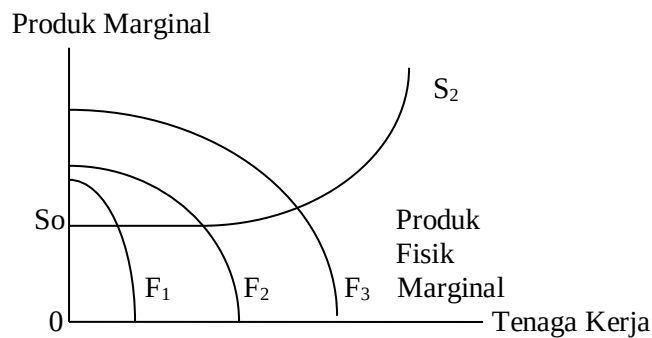
2.1.3.1 Teori Fei-Ranis (Ranis and Fei)

Dalam model Fei-Ranis, konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tahapan transfer tenaga kerja dibagi menjadi tiga berdasarkan pada produk fisik marginal (MPP) dan upah yang dianggap konstan dan ditetapkan secara eksogenus, sebagai berikut :

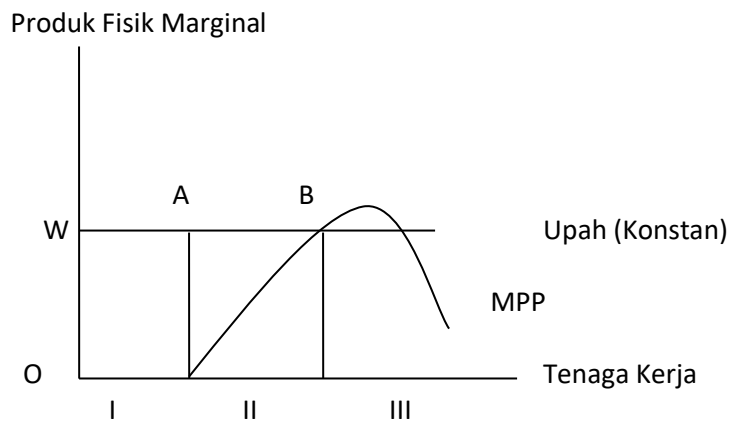
1. Pada tahap pertama, karena tenaga kerja melimpah maka MPP tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna. Pada tahap ini walaupun ada transfer

tenaga kerja, total produksi di sektor pertanian tidak menurun, produktivitas tenaga kerja meningkat dan sektor industri dapat tumbuh karena didukung oleh adanya tambahan tenaga kerja yang disediakan sektor pertanian.

2. Pada tahap kedua, pengurangan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi karena MPP tenaga kerja sudah positif (ruas AB) namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W . Transfer tenaga kerja dari pertanian ke industri pada tahap ini mempunyai biaya seimbang yang positif, sehingga kurva penawaran tenagakerja di sektor industri mempunyai elastisitas positif sejak titik S_1 . Transfer akan tetap terjadi, produsen disektor pertanian akan melepaskan tenaga kerjanya walaupun mengakibatkan produksi menurun karena penurunan tersebut lebih rendah dari besarnya upah yang tidak jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke sektor industri menurun sementara permintaannya meningkat (karena tambahan tenaga kerja masuk), harga relative komoditi pertanian akan meningkat.
3. Tahap ketiga adalah tahap komersialisasi di kedua sektor ekonomi, dimana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah. Produsen pertanian akan mempertahankan tenaga kerjanya sehingga masing-masing sektor berusaha efisien. Transfer masih akan terus terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat meningkatkan MPP tenaga kerja. Sementara permintaan tenaga kerja terus meningkat dari sektor industri dengan asumsi keuntungan di sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha. Mekanismenya diringkas pada Gambar 2.1.3.1



a) Sektor Industri



b) Sektor Pertanian

Gambar 2.1.3.1

Model Fei-Ranis tentang transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri

Dalam model FR ini kecepatan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri tergantung pada: (a) tingkat pertumbuhan penduduk, (b) perkembangan teknologi di sektor pertanian dan (c) tingkat pertumbuhan stok modal di sektor industri dan surplus yang dicapai di sektor pertanian. Dengan demikian keseimbangan pertumbuhan di kedua sektor tersebut menjadi prasyarat untuk menghindari stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ini Berarti

kedua sektor tersebut harus tumbuh secara seimbang dan transfer serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja.

2.1.3.2 Teori W. Arthur Lewis

Transformasi struktural suatu perekonomian subsisten di rumuskan oleh seorang ekonom besar yaitu W. Arthur Lewis. Dengan teorinya model dua sektor Lewis antara lain :

1. Perekonomian Tradisional

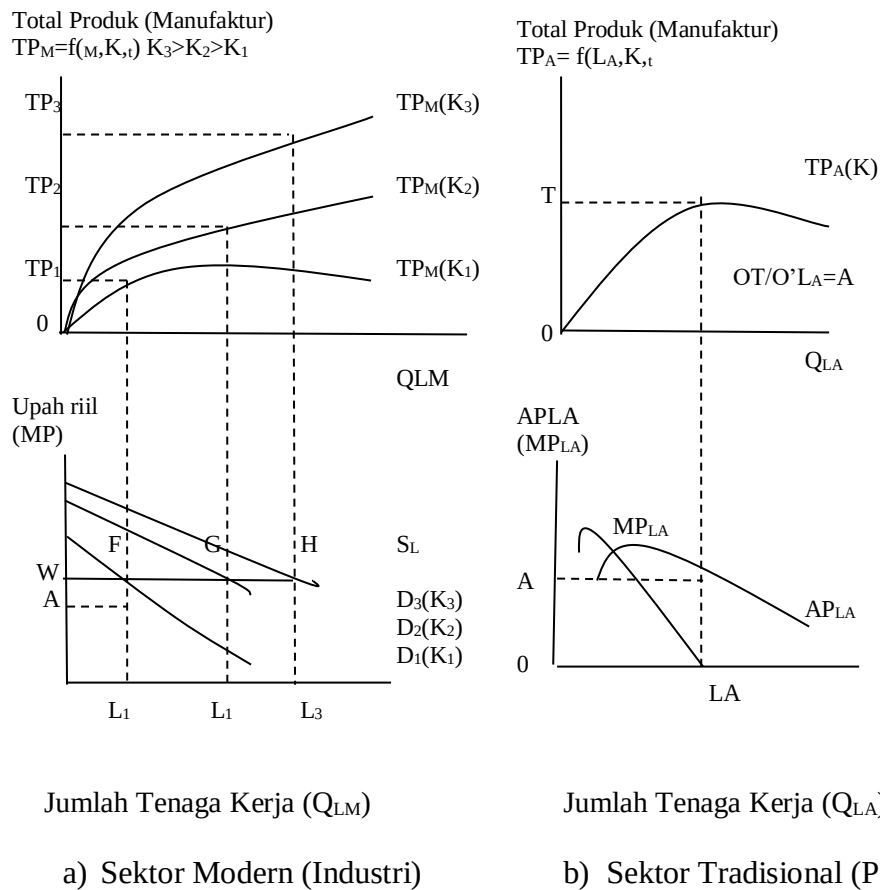
Dalam teori ini Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten, hal ini di akibatkan kelebihan penduduk dan di tandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol.

2. Perekonomian Industri

Pada perekonomian ini terletak pada perkotaan modern yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Dengan demikian perekonomian perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan sehingga penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang di produksi.

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (*self-sustaining growth*) dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut di atas diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan

diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat di tarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan dan perekonomian itu pun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasi kepada pola kehidupan perkotaan.



Gambar 2.1.3.2
 Model Pertumbuhan Sektor Modern dalam Perekonomian Dua Sektor
 dengan Surplus Tenaga Kerja

2.1.3.3 Teori Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* menjelaskan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi dari negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang berhubungan sangat erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya (*Human Capital*).

1. Dilihat dari Permintaan Domestik

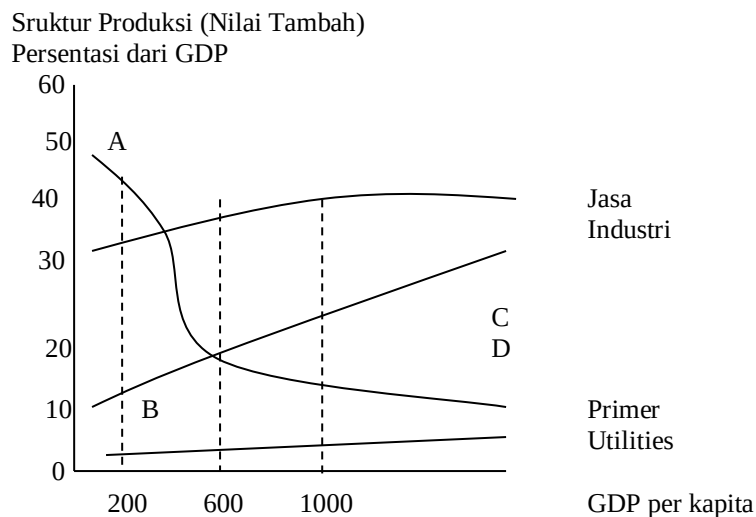
Apabila dilihat dari permintaan domestik akan terjadi penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan oleh peningkatan permintaan terhadap barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah yang mengalami peningkatan dalam struktur GNP yang ada. Di sektor perdagangan internasional terjadi juga perubahan yaitu peningkatan nilai ekspor dan impor. Sepanjang perubahan struktural ini berlangsung terjadi peningkatan pangsa ekspor komoditas hasil produksi sektor industri dan penurunan pangsa sektor yang sama pada sisi impor.

2. Dilihat dari Tenaga Kerja

Apabila dilihat dari sisi tenaga kerja ini akan terjadi proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian di desa menuju sektor industri di perkotaan, meski pergeseran ini masih tertinggal (*lag*) dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan *lag* inilah maka sektor

pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik dari awal maupun akhir dari proses tranformasi perubahan struktural tersebut.

Secara umum negara-negara yang memiliki tingkat populasi tinggi yang pada dasarnya menggambarkan tingkat permintaan potensial yang tinggi, cenderung untuk mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Artinya mereka memproduksi sendiri barang-barang yang dulunya impor untuk kemudian dijual dipasaran dalam negeri. Sebaliknya negara-negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, cenderung akan mengembangkan industri yang berorientasi ke pasar internasional. Teori perubahan struktural menjelaskan bahwa percepatan dan pola transformasi struktural yang terjadi pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan satu dengan yang lain.



Gambar 2.1.3.3 Transformasi Produksi

2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah/Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting analisa dalam Ekonomi Regional. Alasannya jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat (Sjafrizal, 2008).

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi wilayah/regional sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Klasik

Adam Smith (1723-1790) adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis sehingga dijuluki nabi ekonomi. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*) (Tarigan, 2005).

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa bercocok tanam,

masa perdagangan, dan tahap masa industri. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis.

Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produk dan jasa. Sementara peranan pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban serta memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi. Jhon Maynard Keynes mengoreksi pandangan Smith dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, dan pengawasan langsung. Adam Smith dan John Maynard Keynes tetap mengandalkan mekanisme pasar. Perbedaannya adalah ada yang menginginkan peran pemerintah yang cukup besar tetapi ada pula yang menginginkan peran pemerintah haruslah sekecil mungkin.

2. Teori Harrod-Domar dalam sistem regional

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) di tentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional(s) serta rasio modal-output nasional. Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni semakin banyak bagian-bagian GDP yang di tabung dan di investasikan, maka akan lebih besar lagi GDP yang di hasilkannya) dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-

output dari suatu perekonomian (yakni, semakin besar rasio modal output nasional atau, maka tingkat pertumbuhan GDP akan semakin rendah) (Michael P.Todaro, Stephen C. Smith.2003).

Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini didasarkan atas asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ($MPS=s$) adalah konstan,
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap,serta
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat di serap oleh pasar) hanya bias biasa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g= k=n,$$

dimana:

g = growth (tingkat pertumbuhan output)

k = capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Dalam Model ini, kelebihan atau kekurangan tabungan dan dengan tenaga kerja dapat dinetralisir oleh arus keluar atau arus masuk. Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat

menyeimbangkan atau tidak. Pada model ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang (Robinson Tarigan, 2004)

1). Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Rober M.Solow (1970) dari Amerika Serikat dan TW.Swan (1959) dari Australia. Menurut teori ini tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu di arahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna perekonomian bisa tumbuh maksimal. Analisis lanjutan dari paham neo-klasik menunjukkan bahwa terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan satu tingkat *s (saving)* yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah itu.

Dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu di tempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan modal. Harus di jamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kestabilan politik (Tarigan,2005).

2). Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh Samelson (2001). Setiap Negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar

dan dapat dikembangkan dengan cepat baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relative singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian yang cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Perkembangan struktur tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung sehingga pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

3). Model Pertumbuhan Interregional (perluasan dari teori basis)

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Dalam model ini diasumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2004).

Dalam penelitian ini di gunakan teori basis ekonomi karena teori ini adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana dan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperjelas struktur daerah yang bersangkutan. Teori ini juga memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional dan juga dapat digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah (Adisasmita,2005).

2.1.5 Ketenagakerjaan

2.1.5.1 Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja (*manpower*) dibagi pula ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*laborforce*) dan bukan penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan (Dumairy,1996). Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud penganggur adalah orang

yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan (Bellante dan Jackson,1990).

2.1.5.2 Tenaga Kerja di Negara Sedang Berkembang (NSB)

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di NSB yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Tenaga kerja yang tidak bekerja bekerja secara penuh mempunyai berbagai bentuk, termasuk berbagai bentuk dan underemployment di NSB sangat jarang, tetapi dari hasil studi ditunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari penduduk perkotaan di NSB bisa dikatakan tidak bekerja secara penuh (*underutilized*). Untuk itu dalam mengurangi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi NSB perlu adanya solusi yaitu, memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur yang paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada penghapusan (Lincoln Arsyad, 1999:315).

2.1.6 Teori Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro, 2004). Secara konsep, estimasi penghitungan nilai PDRB menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (*atcurrentprice*), dan atas dasar harga

konstan (*at constan price*). Baik PDRB harga berlaku maupun harga konstan masing-masing mempunyai interpretasi data yang berbeda (Kuncoro,2004).

Penghitungan produk domestik ini lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu (Kuncoro, 2004).

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan.PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat metode pendekatan yaitu:

1). Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2). Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji,

surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintah dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga netto, sewa tanah, dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3). Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan yayasan sosial; pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen diatas harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

4). Metode Alokasi

Metode ini digunakan jika data suatu unit produksi disuatu daerah tidak tersedia. Nilai tambah suatu unit produksi di daerah tersebut dihitung dengan menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya data suatu kabupaten diperoleh dari alokasi data provinsi.

Pengukuran PDRB dengan menggunakan pendekatan produksi, menurut Badan Pusat Statistik dikelompokkan menjadi 9 sektor ataupun lapangan usaha yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restourant, Pengaangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-

masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. (Hadi Sasana, 2006)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2016). Sedangkan dalam “Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di provinsi Nusa Tenggara Timur” menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut (Gatot Dwi Adiatmojo 2003).

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu di suatu daerah baik secara agrerat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui:

- a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
- b. Gambaran Struktur perekonomian
- c. Perkembangan pendapatan perkapita
- d. Tingkat kemakmuran masyarakat
- e. Tingkat inflasi dan deflasi.

2.1.7 Model Location Quotient (Kuosien Lokasi)

Location Quotient (Kuosien Lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja (Tarigan, 2015).

Metode analisis praktis yang dapat digunakan untuk mengukur keuntungan komparatif suatu sektor, subsektor atau komoditi adalah dengan menggunakan koefisien lokasi (*location quotient*) yang mula-mula dikemukakan oleh Robert Murray Haig (1928) yang kemudian banyak digunakan dalam buku-buku analisis ekonomi regional. Teknik ini pada dasarnya sangat sederhana dan memerlukan data yang tidak banyak. Namun demikian, teknik ini juga mempunyai berbagai kelemahan sehingga penggunaannya harus didukung oleh analisis fakta empiris lainnya (Sjafrizal, 2018: 225).

Terdapat tiga jenis data yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien lokasi. *Pertama* adalah nilai tambah (*value-added*) dari masing-masing sektor

atau subsektor sebagaimana terdapat dalam buku statistik PDRB menurut lapangan usaha yang umumnya sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. *Kedua*, adalah nilai produksi barang dan jasa yang dapat dihitung dengan jalan mengalikan data jumlah produksi yang tercatat pada dinas dan instansi pemerintah daerah dengan harga barang dan jasa bersangkutan. *Ketiga*, jumlah orang yang bekerja (*employment*) pada masing-masing sektor, subsektor atau pada setiap komoditi bersangkutan (Sjafrizal, 2018).

Berikut ini rumus Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan, 20015) :

$$LQ = x_i / PDRB \text{ Kab} : X_i / PDRB \text{ Prov}$$

di mana:

x_i = Nilai tambah sektor i di suatu Kabupaten pada tahun tertentu,

PDRB Kab = Total PDRB di suatu Kabupaten pada tahun tertentu,

X_i = Nilai tambah sektor i di provinsi NTT pada tahun tertentu,

PDRB Prov = Total PDRB di provinsi NTT pada tahun tertentu.

Istilah wilayah nasional dapat diartikan untuk wilayah induk/wilayah atasan. Misalnya, apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan provinsi maka provinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan seterusnya. Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah (Tarigan, 2015: 82-83):

1. $LQ > 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada nasional. $LQ > 1$, menunjukkan bahwa peran sektor I cukup menonjol di daerah tersebut dan seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor I dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengeskpor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu

menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau efisien. $LQ < 1$, secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud.

2. $LQ < 1$, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada nasional. $LQ < 1$, secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud.
3. $LQ = 1$, artinya peranan sektor tersebut sama baik di daerah ataupun secara nasional.

Mirip dengan pernyataan di atas, nilai dari Location Quotient (LQ) adalah (Putra, 2011: 168):

1. $LQ > 1$, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor tersebut (Relative Spezialization in Sector). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.
2. $LQ < 1$, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor (Production Deficit in Sector). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut.
3. $LQ = 1$, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih belum layak untuk diekspor (*Average Production in Sector*).

Sektor basis/unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor

yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor pertambangan dan penggalian secara nasional dan waktu perbandingan juga harus sama. Misalnya: sektor industri tahun 2014 di Papua harus diperbandingkan dengan sektor industri Nasional tahun 2014 juga. Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi atau bantuan khusus oleh daerah yang bersangkutan melebihi yang diberikan daerah-daerah lainnya.

Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang sangat sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk *one shot analysis*, manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu hanya melihat apakah LQ berada di atas 1 atau tidak. Akan tetapi, analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk *time-series/trend*, artinya analisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan LQ bisa dilihat untuk sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini bisa memancing analisis

lebih lanjut, misalnya apabila naik dilihat faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih cepat dari rata-rata nasional. Demikian pula apabila turun, dikaji faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih lambat dari rata-rata nasional. Hal ini bisa membantu kita melihat kekuatan/kelemahan wilayah yang lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Adapun faktor-faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah, perlu dipikirkan apakah perlu penanggulangan atau dianggap tidak prioritas (Tarigan, 2015).

Analisis Location Quotient (LQ) umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu Nasional adalah daerah yang lebih luas. Misalnya: Regional (Kab. Jayapura) dengan Nasional (Propinsi Papua); Regional (Propinsi Papua Barat) dengan Nasional (Indonesia).

2.1.8 Model Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Ricardo menggunakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sama untuk dua kegiatan yang berbeda pada dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdangang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut

bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional (Tarigan, 2015).

Prinsip dasar dari model keunggulan komparatif (*comparatif advantage model*) adalah bila mobilitas sumberdaya (faktor produksi) antar wilayah tidak lancar, maka masyarakat suatu daerah akan lebih diuntungkan bila memfokuskan (berspesialisasi) pada kegiatan produksi wilayah tersebut dapat memproduksinya dengan biaya relatif lebih murah (efesien) dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan prinsip tersebut, daerah yang relatif terbelakang dan masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan pertambangan akan lebih diuntungkan bila memfokuskan kegiatan produksinya pada sektor tersebut karena didukung oleh sumber daya alam yang tersedia dan upah buruh yang relatif lebih murah (Sjafrizal, 2008).

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah (Tarigan, 2015).

Dalam perdagangan bebas antardaerah, mekanisme pasar mendorong masing-masing daerah bergerak kearah sektor yang daerahnya memiliki keunggulan komparatif. Akan tetapi, mekanisme pasar seringkali bergerak lambat

dalam mengubah struktur ekonomi suatu daerah. Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah diketahui lebih dahulu, pembangunan sektor itu dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan lambat (Tarigan, 2015).

Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) akan mengembangkan sub sektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. Teori keunggulan komparatif memiliki kelebihan dalam hal efisiensi alokasi sumber daya. Dalam mengembangkan industri-industri yang secara komparatif unggul. Sumber daya ekonomi akan teralokasi ke penggunaan yang paling menguntungkan. Sedangkan kelemahannya terletak pada pendekatannya yang menyandarkan pada sisi produksi. Produk yang memiliki keunggulan komparatif boleh jadi barang yang kurang diminati konsumen, sehingga meskipun efisien diproduksi, mungkin sulit untuk dipasarkan. Pendekatan produksi ini bersifat statis sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan atau dinamika konsumen (Subandi, 2016 : 161).

Teori keunggulan komparatif disusun atas dasar asumsi bahwa mobilitas sumber daya antardaerah adalah tidak lancar (immobile). Akan tetapi, adakalanya para ahli ekonomi regional cenderung mengasumsikan bahwa mobilitas sumber daya antardaerah tersebut adalah cukup lancar. Hal ini terjadi karena analisis

ekonomi regional lebih banyak memerhatikan mobilitas sumber daya antardaerah dalam satu negara yang umumnya memang lebih lancar dibandingkan mobilitas antarnegara, sebagaimana yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan antardaerah di mana jarang sekali ada daerah yang diperbolehkan mengenakan bea masuk terhadap barang masuk ke daerahnya dan sebaliknya (Sjafrizal, 2018: 67).

Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas sub-sektor tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif, dengan kriteria $LQ > 1$. Secara operasional, formulasi LQ dapat dirumuskan sebagai berikut (Hendayana 2003):

$$LQ = x_i / PDRB : X_i / PNB$$

di mana:

- x_i** = Nilai tambah sektor i provinsi Nusa Tenggara Timur,
- PDRB** = Produk Domestik Regional Bruto provinsi Nusa Tenggara Timur,
- X_i** = Nilai tambah sektor i Indonesia,
- PNB** = Produk nasional bruto atau GNP Indonesia.

Faktor-faktor yang bisa membuat suatu daerah memiliki keunggulan komparatif (comparatif advantage) dapat berupa kondisi alam, yaitu sesuatu yang sudah given tetapi dapat juga karena usaha-usaha manusia. Suatu wilayah memiliki keunggulan komperatif karena salah satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor yang diuraikan berikut ini. Dalam Faktor-faktor yang dapat membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat dikelompokan sebagai berikut (Tarigan, 2015):

1. Pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pemberian alam,

antara lain deposit bahan tambang (minyak, gas, emas, biji besi, timah, dan lainnya); kondisi tanah yang khas (misalnya tanah Deli untuk produksi tembakua Deli); pemandangan yang indah (misalnya Danau Toba dan alam pegunungan Koro); serta potensi alam (misalnya air terjun untuk pembangkit listrik dan sumber air panas untuk pembangkit listrik).

2. Masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir (menemukan hal-hal baru) untuk jenis produk tertentu, contoh: masyarakat Jepang, Amerika, dan Jerman.
3. Masyarakat menguasai keterampilan khusus, misalnya ukiran Jepang, ukiran Bali, dan kain songket batu bara.
4. Wilayah itu dekat dengan pasar, misalnya lokasi pabrik batu bara di sekitar Labuk Pakam dan Tanjung Morawa karena dekat dengan pasar, yaitu Medan.
5. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi, misalnya Singapura dengan lalu lintas yang ramai (baik darat, laut, maupun udara) membuat angkutan barang penampung bisa lebih cepat, tepat waktu, dan lebih murah karena banyak pilihan.
6. Daerah konsentrasi/sentra dari suatu kegiatan sejenis, misalnya produk sepatu di Cibaduyut (Jabar) dan sayur-sayur di Tanah Koro. Daerah sentra bisa menjamin kepastian adanya barang dalam kualitas dan kuantitas yang diinginkan dan ini bisa menurunkan biaya pemasaran /biaya transportasi.

7. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu memanfaatkan keuntungan aglomerasi, yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran.
8. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta dukungan oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung. Pengertian upah buruh yang rendah adalah relatif, artinya harus dikaitkan dengan produktivitas.
9. Mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan: jujur, terbuka, mau bekerja keras, dan disiplin sehingga lingkungan kehidupan aman, tertib, dan teratur. Kondisi masyarakat seperti ini akan menjamin keberlangsungan investasi, biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah dan efisien.
10. Kebijakan pemerintah antara lain dengan menciptakan salah satu/beberapa faktor yang menciptakan keunggulan seperti disebutkan di atas. Ada juga cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan subsidi untuk mendorong sektor tertentu. Akan tetapi, hal ini haruslah bersifat sementara sehingga akhirnya dapat bersaing tanpa subsidi. Selama pemerintah masih memberikan subsidi, keunggulan tersebut adalah keunggulan semu. Sistem subsidi ini membuat pihak luar negeri, pembeli barang menuduh tidak fair dan mencurigai adanya praktik dumping.

2.1.9 Shift-Share

Dalam (Taringan, 2015:82) mengatakan bahwa analisis *Shift-Share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan

dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan metode atas faktor penyebab sedangkan metode *shift-share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur sektor (industri) suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Menurut Prof. Sjafrizal (2005) dalam buku teks John P. Blair (1991) bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* sebagai berikut:

$$\Delta y_i = [y_i (Y^t / Y^0 - 1)] + [y_i (Y_i^t / Y_i^0) - (Y^t / Y^0)] + [y_i (y_i^t / y_i^0) - (Y_o^t / Y_i^0)]$$

Di mana :

Δy_i = perubahan nilai tambah sektor i;

y_i^0 = nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada tahun awal periode;

y_i^t = nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada akhir periode;

Y_o^t = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada tahun awal periode;

Y_i^0 = nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada tahun akhir periode.

Persamaan diatas menunjukan bahwa peringkatan nilai tambah suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan (*decompose*) atas 3 bagian. Bagian pertama pada sisi kiri persamaan tersebut adalah:

1. *Regional Share* : $[y_i (Y^t / Y^0 - 1)]$ adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijakan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.
2. *Proportionality Shift (Mixed Shift)* : $[y_i (y_i^t / y_i^0) - (Y_o^t / Y_i^0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yang berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
3. *Differential Shift (Competitif Shift)* : $[y_i (y_i^t / y_i^0) - (Y_o^t / Y_i^0)]$ adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan inilah yang merupakan Keuntungan Kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

Sebagaimana halnya dengan model pertumbuhan ekonomi regional lainnya, analisis *shift-share* ini juga mempunyai beberapa kelemahan tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Stimson, Robert, Roger R. Stough dan Brian H. Robert (2006), kelemahan tersebut antara lain adalah (Sjarizal, 2018):

1. Perubahan dalam struktur industri pada tingkat nasional juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan hal ini tidak diperhitungkan dalam analisis *shift-share*;
2. Hasil perhitungan analisis *shift-share* ini sangat sensitif terhadap waktu, tingkat pengelompokan sektor dan regional yang dilakukan;
3. Analisis tidak dapat memberikan informasi tentang kemampuan regional bersangkutan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut, Stimson dkk. (2006), menyarankan untuk menggunakan pendekatan metode ekonometrik sebagaimana yang diusulkan oleh Emerson, *et al.* (1975) serta Berzeg dan Koran (1978). Model ekonometrik tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{ij,t} = a + b_i + (g_j + d_{ij}) + e_{ijt}$$

Di mana:

$Y_{ij,t}$ = tingkat pertumbuhan dalam periode analisis

a = dampak pertumbuhan secara keseluruhan

b_i = pengaruh struktur industri (*proportionality shift*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

g_j = pengaruh regional (*regional share*)

d_{ij} = potensi khusus daerah (*differential shift*)

$g_j + d_{ij}$ = pengaruh daya saing daerah terhadap pertumbuhan.

Regresi untuk persamaan diatas dapat dilakukan dalam bentuk *cross-section* di mana daerah merupakan unit observasi (n). Untuk dapat melakukan regresi yang demikian, maka perhitungan *shift-share* harus dilakukan untuk masing-masing provinsi atau daerah. Untuk kasus Indonesia tentunya jumlah observasi adalah 34 provinsi, yaitu sesuai dengan provinsi. Di samping itu, regresi juga dapat dilakukan dalam bentuk *time series* untuk suatu provinsi atau daerah tertentu. Untuk dapat melakukan hal ini maka perhitungan *shift-share* harus dilakukan untuk setiap tahun sesuai dengan data yang tersedia. Bila jumlah data tersedia terbatas, dapat pula dilakukan gabungan antara metode *cross-section* dan *time series* (*Pooling Data System*). Melalui teknik analisis regresi ini akan dapat

diketahui secara lebih tegas berikut tingkat signifikansi dari masing-masing variabel *shift-share* tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Uray Dian Novita, 2015)	1. PDR B 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Analisis Location Quotient (LQ) 2. Analisis Shift Share 3. Analisis Klassen Typoogy	1. Hasil analisis location quontient menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa merupakan sektor basis. 2. Hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang berkompetitif. 3. Hasil analisis Typology Klassen menunjukkan bahwa sektor yang tergolong sektor maju dan tumbuh dengan cepat adalah sektor listrik, gas, dan air minum, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.
2	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan studi sektor unggulan di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah (Hastarini Dwi Atmanti, 2014)	1. PDR B 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Location Quotient (LQ) 2. Shift Share	1. Pada kurun waktu 2002-2006 Kabupaten Kendal memiliki sektor unggulan meliputi sektor pertanian, sektor industry pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Namun, pada tahun 2006 sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor unggulan, ini dapat dilihat dari nilai LQ sektor tersebut yang kurang dari 1. 2. Dari hasil analisis Shift Share, wilayah

				Bakorlin III secara umum tidak jauh berbeda dengan dua wilayah Bakorlin sebelumnya. Kesamaan kondisi umum tergambar pada nilai NS yang positif, sebagian besar berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan cepat dan seluruh daerah tidak memiliki keuntungan lokasional seperti di Bakorlin I dan Bakorlin II juga terjadi di bakorlin III.
3	Analisis Sektor Unggulan Dengan Pendekatan Location Quotient Kabupaten Pelalawan (Anthoni Mayes, 2013)	1. PDR B	1. Location Quotient (LQ)	1. Berdasarkan hasil analisis location quotient sektor-sektor yang potensial dan dapat di andalkan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan selama tahun analisis 2005-2009 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian. Karena sektor tersebut mempunyai nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$), sehingga digolongkan sebagai sektor basis. Untuk sektor pertanian sub sektor kehutanan, tanaman perkebunan juga memiliki LQ yang besar lebih dari satu, sedangkan tanaman bahan makanan nilai LQ semakin meningkat dan pada akhir tahun analisis nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) sub sektor tersebut merupakan sektor basis.
4	Analisis sektor unggulan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (M.E.Perseveranda, SE	1. PDR B 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Location Quotient (LQ) 2. Klassen Typology	1. Berdasarkan analisis LQ, sektor basis atau unggulan pada kabupaten-kabupaten di Provinsi NTT sebagian besar terdapat pada sektor pertanian yang nilai kebasisannya selama tahun 2005-2007 cenderung fluktuatif. 2. Dari indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, berdasarkan Klassen Typology selama tahun 2005-2007, Kabupaten Sumba Timur

	,M..Si, 2011)			dan Kota Kupang teetap bertahan dalam kategori daerah maju, Kabupaten Belu, Alor, Rote Ndao termasuk kategori daerah berkembang, sedangkan Kabupaten TTU, Lembata dan Manggarai termasuk kategori daerah terbelakang. Kabupaten lain kategorinya terjadi pergeseran yakni cenderung fluktuatif dan menurun.
--	---------------	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam suatu struktur ekonomi, tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto adalah yang paling penting karena untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta untuk memproyeksikan sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan sektor non basis di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang pembangunan daerah yang dilakukan (baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan non ekonomi) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, semakin luas otonomi diberikan pada suatu daerah, maka akan semakin besar tanggung jawab daerah dan tentu saja juga semakin besar biaya penyelenggaraannya. Dengan demikian, untuk dapat membangun daerah dengan baik, khususnya pada era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah perlu mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor basis baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Dengan harapan sektor-sektor tersebut akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, maupun dalam rangka mendukung pengembangan sektor perekonomian secara keseluruhan. Sektor industri mempunyai ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian. Perkembangan sektor industri akan disertai dengan penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh karena sektor industri tidak menghasilkan bahan makanan. Sektor industri tidak dapat

berkembang tanpa didukung perkembangan sektor pertanian. Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi atau produksi yang tidak merata, dan sisi lain tidak diikuti oleh kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan struktur dari kedua aspek tersebut yang semakin menjauh baik antar sektor maupun antar subsektor pada masing-masing sektor. Pada bahasan berikut berturut-turut akan dilihat perubahan dari struktur tersebut baik antar sektor maupun antar subsektor yang difokuskan pada sektor pertanian, mengingat sektor ini masih menjadi tumpuan sebagian pekerja Indonesia.

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa sehingga dapat menyebabkan menurunnya volume kegiatan. Alat analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membandingkan pada tingkat Nasional.

Apabila nilai LQ suatu sektor ekonomi ≥ 1 maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan, sedangkan bila nilai LQ suatu sektor atau sub sektor ekonomi < 1 maka sektor atau sub sektor ekonomi tersebut merupakan sektor non basis dalam perekonomian daerah yang bersangkutan (Anonim, 2002).

Gambar 2.3.1
Kerangka Pemikiran

